



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 57 TAHUN 2025

TENTANG

TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengoptimalkan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai pendapatan asli daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu diatur pencapaian target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara triwulan dalam peraturan kepala daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);

6. Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2024 tentang Kabupaten Buleleng di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7011);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN

ANGGARAN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat.
5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
6. Target adalah sasaran atau batas ketentuan yang telah ditetapkan untuk dicapai.
7. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
8. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.
9. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa

tertentu.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk mengatur penetapan jumlah Target Penerimaan Daerah dari Pajak dan Retribusi setiap triwulan pada tahun anggaran 2026.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk penghitungan jumlah persentase capaian Target Penerimaan Daerah dari Pajak dan Retribusi sebagai pedoman penyusunan Keputusan Bupati tentang pembagian Insentif Pajak dan Retribusi.

BAB II

TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI

DAERAH

Pasal 3

- (1) Penetapan Target penerimaan Pajak setiap triwulan tahun anggaran 2026 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Penetapan Target penerimaan Retribusi setiap triwulan tahun anggaran 2026 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Dalam hal Target penerimaan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercapai, perangkat Daerah pemungut Pajak atau Retribusi dapat diberikan Insentif.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

untuk tahun anggaran berkenaan dapat dibayarkan sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan yang dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 31 Desember 2025
BUPATI BULELENG,
Ttd.
I NYOMAN SUTJIDRA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 31 Desember 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,
Ttd.

GEDE SUYASA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2025 NOMOR 58

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

ttd

Made Bayu Waringin, S.H., M.H.

NIP. 19810716 200803 1001

jdih.bulelengkab.go.id

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BULELENG
 NOMOR 57 TAHUN 2025
 TENTANG
 TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2026

TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH SETIAP TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2026

NO	JENIS PAJAK	TARGET INDUK TH 2026	INSENTIF INDUK 5%	TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN III		TRIWULAN IV	
				%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp
1	PAJAK REKLAME	11,000,000,000.00	550,000,000.00	15	1,650,000,000.00	40	4,400,000,000.00	75	8,250,000,000.00	100	11,000,000,000.00
2	PAJAK AIR TANAH	3,000,000,000.00	150,000,000.00	15	450,000,000.00	40	1,200,000,000.00	75	2,250,000,000.00	100	3,000,000,000.00
3	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	500,000,000.00	25,000,000.00	15	75,000,000.00	40	200,000,000.00	75	375,000,000.00	100	500,000,000.00
4	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN	30,000,000,000.00	1,500,000,000.00	15	4,500,000,000.00	40	12,000,000,000.00	75	22,500,000,000.00	100	30,000,000,000.00
5	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	70,505,000,000.00	3,525,250,000.00	15	10,575,750,000.00	40	28,202,000,000.00	75	52,878,750,000.00	100	70,505,000,000.00
	PBJT atas:										
6	PBJT MAKANAN DAN/ATAU MINUMAN	56,000,000,000.00	2,800,000,000.00	15	8,400,000,000.00	40	22,400,000,000.00	75	42,000,000,000.00	100	56,000,000,000.00

7	PBJT TENAGA LISTRIK	70,000,000,000.00	3,500,000,000.00	15	10,500,000,000.00	40	28,000,000,000.00	75	52,500,000,000.00	100	70,000,000,000.00
8	PBJT JASA PERHOTELAN	70,000,000,000.00	3,500,000,000.00	15	10,500,000,000.00	40	28,000,000,000.00	75	52,500,000,000.00	100	70,000,000,000.00
9	PBJT JASA PARKIR	500,000,000.00	25,000,000.00	15	75,000,000.00	40	200,000,000.00	75	375,000,000.00	100	500,000,000.00
10	PBJT JASA KESENIAN DAN HIBURAN	7,500,000,000.00	375,000,000.00	15	1,125,000,000.00	40	3,000,000,000.00	75	5,625,000,000.00	100	7,500,000,000.00
11	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	64,043,712,348.00	3,202,185,617.40	15	9,606,556,852.20	40	25,617,484,939.20	75	48,032,784,261.00	100	64,043,712,348.00
12	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR	66,708,253,977.00	3,335,412,698.85	15	10,006,238,096.55	40	26,683,301,590.80	75	50,031,190,482.75	100	66,708,253,977.00
JUMLAH		449,756,966,325.00	22,487,848,316.25		67,463,544,948.75		179,902,786,530.00		337,317,724,743.75		449,756,966,325.00

BUPATI BULELENG,

Ttd.

I NYOMAN SUTJIDRA

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BULELENG
 NOMOR 57 TAHUN 2025
 TENTANG
 TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2026

TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2026

NO	JENIS PAJAK	TARGET INDUK TH 2026	INSENTIF INDUK 5%	TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN III		TRIWULAN IV	
				%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp
	A. RETRIBUSI JASA UMUM										
1	PELAYANAN KESEHATAN	282,079,475,000.00	14,103,973,750.00	15	42,311,921,250.00	40	112,831,790,000.00	75	211,559,606,250.00	100	282,079,475,000.00
	PELAYANAN KEBERSIHAN atas:										
2	PELAYANAN PERSAMPAHAN	3,500,000,000.00	175,000,000.00	15	525,000,000.00	40	1,400,000,000.00	75	2,625,000,000.00	100	3,500,000,000.00
3	PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS	250,000,000.00	12,500,000.00	15	37,500,000.00	40	100,000,000.00	75	187,500,000.00	100	250,000,000.00
4	PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM	7,500,000,000.00	375,000,000.00	15	1,125,000,000.00	40	3,000,000,000.00	75	5,625,000,000.00	100	7,500,000,000.00

	B. RETRIBUSI JASA USAHA										
5	PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH	80,000,000.00	4,000,000.00	15	12,000,000.00	40	32,000,000.00	75	60,000,000.00	100	80,000,000.00
6	PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR, GROSIR, PERTOKOAN, DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA	250,000,000.00	12,500,000.00	15	37,500,000.00	40	100,000,000.00	75	187,500,000.00	100	250,000,000.00
7	PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DILUAR BADAN JALAN	650,000,000.00	32,500,000.00	15	97,500,000.00	40	260,000,000.00	75	487,500,000.00	100	650,000,000.00
8	PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK	200,000,000.00	10,000,000.00	15	30,000,000.00	40	80,000,000.00	75	150,000,000.00	100	200,000,000.00
9	PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA	8,500,000,000.00	425,000,000.00	15	1,275,000,000.00	40	3,400,000,000.00	75	6,375,000,000.00	100	8,500,000,000.00
10	PEMANFAATAN ASET DAERAH	4,005,000,000.00	200,250,000.00	15	600,750,000.00	40	1,602,000,000.00	75	3,003,750,000.00	100	4,005,000,000.00
	C. RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU										
11	PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG	6,800,000,000.00	340,000,000.00	15	1,020,000,000.00	40	2,720,000,000.00	75	5,100,000,000.00	100	6,800,000,000.00

12	PENGUNAAN TENAGA KERJA ASING (TKA)	3,000,000,000.00	150,000,000.00	15	450,000,000.00	40	1,200,000,000.00	75	2,250,000,000.00	100	3,000,000,000.00
JUMLAH		316,814,475,000.00	15,840,723,750.00		47,522,171,250.00		126,725,790,000.00		237,610,856,250.00		316,814,475,000.00

BUPATI BULELENG,

Ttd.

I NYOMAN SUTJIDRA